



## **Implementasi Pembelajaran PPKn Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMP Negeri X Lingsar**

**Sari Endri Pratiwi<sup>1</sup>, Mumbrita Sulaimi<sup>2</sup>, Yuliatin<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program S1 PPKn FKIP Universitas Mataram,

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembelajaran PPKn berbasis kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah 1) Persiapan yang sudah dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn melalui sosialisasi dan pelatihan Kurikulum 2013 belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 karena guru PPKn kelas VII dan VIII SMPN X Lingsar kurang memahami secara komprehensif dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kurang mampu menerapkan perencanaan pembelajaran dalam kegiatan melaksanakan pembelajaran dan belum mampu menilai proses dan hasil belajar siswa belajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, 2) Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, 3) Pelaksanaan pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013 belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Rancangan Pembelajaran, 4) Penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh guru PPKn belum terlaksana sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.

**Kata kunci:** Implementasi Kurikulum 2013 dan Mata pelajaran PPKn

### **Abstract**

The purpose of this study to know the implementation Curriculum 2013 PPKn learning process. This study used a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were used: documentation, observation, and interview. The results of this study were 1) Preparations are already carried out by SMPN X Lingsar and teachers PPKn through socialization and training Curriculum 2013 has not been fully able to support the implementation of Curriculum 2013 for teachers PPKn class VII and VIII SMPN X Lingsar less understood comprehensively in planning learning, less able to apply the learning plan in the activities of implementing learning and have not been able to assess the process and learning outcomes of students studying in accordance with the demands of

Curriculum 2013, 2) Devices of learning used by teachers PPKn yet fully complete in accordance with the demands of Curriculum 2013, 3) implementation of learning PPKn based Curriculum 2013 was not carried out in accordance with the design of learning, 4) learning process and results done by teachers terlaksana PPKn not in accordance with the demands of Curriculum 2013.

**Key words:** Implementation Curriculum 2013, and Pancasila and civic education

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV yaitu Negara Indonesia hendak mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya pada ranah kognitif saja, akan tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Manusia Indonesia diharapkan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pengembangan kurikulum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Kurikulum 2013 arahnya sangat jelas, yaitu adanya keseimbangan kompetensi antara sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*). Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan internal maupun tantangan eksternal (Permendikbud No 68 Tahun 2013). Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik.

Sebagai tindak lanjut dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang akan ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi delapan standar pendidikan dan Ayat (1a) menyebutkan Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, maka muncullah Kurikulum 2013 yang berorientasi pada pendekatan scientific, yang diarahkan pada pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan ilmiah). Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013).

Permendikbud No 54 Tahun 2013 menyebutkan tentang kompetensi lulusan yang digunakan di jenjang pendidikan SMP/ MTs. Kompetensi Lulusan pada jenjang ini meliputi 3 dimensi yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara mendasar, ada empat perubahan besar dalam Kurikulum 2013, yaitu (1) konsep kurikulum (seimbang antara *hardskill* dan *softskill*, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian), (2) buku yang dipakai berbasis kegiatan (*activity base*) dan tematik terpadu, (3) proses pembelajaran dan (4) proses penilaian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Dokumentasi, (2) Observasi partisipasi pasif, (3) Wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan simpulan.

## TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Persiapan yang sudah dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn untuk dapat melaksanakan Kurikulum 2013

#### *Sosialisasi dan Pelatihan*

Berdasarkan temuan penelitian tentang persiapan yang dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 yaitu dalam bentuk sosialisasi yang telah diikuti oleh guru PPKn SMPN X Lingsar belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 karena guru PPKn kelas VII dan VIII SMPN X Lingsar kurang memahami secara komprehensif dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan belum mampu menilai proses dan hasil belajar siswa belajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.

Seyogyanya persiapan yang dilakukan tidak hanya dengan mengikuti sosialisasi, namun guru juga harus secara proaktif meningkatkan kualitas dirinya melalui berbagai kegiatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru.

#### *Penyiapan sumber-sumber belajar di SMPN X Lingsar*

- 1) Pesan berupa silabus dan RPP belum lengkap karena terdapat beberapa komponen yang belum ada yaitu dalam silabus yang digunakan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar pada kelas VII komponen yang belum lengkap yaitu **(a)** identitas sekolah, rumusan KD 1 dan KD 2, materi pokok untuk KD 1 dan KD 2 dan alokasi waktu. **(b)** pada silabus kelas VIII Komponen yang belum lengkap yaitu materi pokok untuk KD 1 dan KD 2 dan alokasi waktu.

Guru seharusnya melakukan penyesuaian terhadap silabus yang digunakan agar seluruh komponen dalam silabus termuat karena silabus yang dikeluarkan oleh Kemendikbud bersifat umum berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Seyogyanya dalam rancangan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil belajar siswa berisi 4 Kompetensi yaitu kompetensi sikap religius, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Pengembangan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran harus *holistik dan integratif*.

Temuan selanjutnya pada dasarnya guru tidak dapat melakukan pengembangan sikap apabila objek yang akan dikembangkan tidak dirumuskan. Oleh karena itu, guru diharapkan untuk melakukan *rekonstruksi* terhadap silabus yang digunakan Untuk setiap materi pokok dalam silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan).

Dalam penelitian ini juga diperoleh beberapa temuan penelitian tentang perangkat pembelajaran berupa RPP yaitu: **a)** RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VII SMPN X Lingsar terdapat beberapa komponen yang tidak ada yaitu alokasi waktu, Kompetensi Dasar dan indikator untuk KI 1 dan KI 2, penilaian proses dan hasil belajar, **b)** Komponen dalam RPP kelas VIII yang tidak ada yaitu tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran.

Seharusnya guru menentukan alokasi waktu yang akan menentukan jumlah pertemuan dalam setiap KD yang dibelajarkan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013, guru menentukan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD.

Temuan kedua seharusnya guru mengembangkan KD dan indikator untuk KI 1 dan KI 2 berdasarkan rumusan KD 3 dan KD 4. Dalam perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran PPKn harus memuat 4 kompetensi yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Temuan ketiga instrumen penilaian pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Oleh karena itu, guru seharusnya menerapkan standar penilaian yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu menekankan pada penilaian autentik. Menurut **Kunandar (2013:35)** Penilaian autentik yaitu kegiatan menilai siswa, baik proses maupun hasil belajar yang dilakukan melalui berbagai teknik dan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan KI dan KD.

Selanjutnya guru seharusnya merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang digunakan berdasarkan KD mengacu pada

indikator. Tujuan pembelajaran mengandung empat unsur yaitu *Audience* (siswa), *Behavior*, Proses dan *degree*.

Metode yang digunakan oleh guru PPKn yang tercantum dalam RPP maupun pelaksanaan pembelajaran seyogyanya bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti penggunaan metode pembelajaran PBL, PjBL, *Inquiry Learning*, *Discovery Learning* dan yang lebih khusus untuk PPKn yaitu model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT). Melalui penggunaan metode yang bervariasi akan dapat menciptakan pembelajaran menjadi efektif, efisien, menarik dan menyenangkan.

## 2) Bahan Pembelajaran

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu **a)** bahan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PPKn SMPN X Lingsar hanya buku guru dan buku siswa yang telah disiapkan oleh Pemerintah; **b)** buku siswa sebagai acuan siswa dalam proses pembelajaran di kelas karena semua materi sudah terinci di dalam buku tersebut dan buku guru digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil belajar siswa; **c)** Dalam buku siswa yang digunakan ada beberapa komponen yang belum termuat yaitu nama sekolah, alokasi waktu dan Kompetensi Dasar sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Bahan ajar yang digunakan oleh guru adalah buku guru dan buku siswa yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku guru digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil belajar siswa. Buku siswa sebagai acuan siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

Temuan selanjutnya setiap kegiatan pembelajaran memerlukan bahan ajar yang utuh. Utuh maksudnya adalah bahwa bahan ajar yang digunakan siswa berupa buku paket memuat semua kompetensi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guru disarankan mengembangkan bahan ajar yang akan digunakan dengan cara melakukan *rekonstruksi*, sehingga nantinya dapat memuat semua kompetensi secara utuh yaitu kompetensi **sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan**.

## 3) Alat dan media pembelajaran.

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu **a)** jumlah alat pembelajaran berupa LCD belum memenuhi standar; **b)** Saat pelaksanaan pembelajaran, guru tidak menggunakan laptop dan tidak menggunakan media pembelajaran sesuai dengan yang tertera dalam RPP.

Jumlah alat pembelajaran berupa LCD hanya terdapat 2 buah LCD di sekolah. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 28 sehingga jumlah LCD yang tersedia tidak memenuhi standar karena tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada.

Selanjutnya guru seharusnya menggunakan media pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan sikap religius siswa melalui penggunaan *PowerPoint*, video dan media gambar lainnya yang mengandung pesan religi dan sosial. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan siswa media yang dapat digunakan yaitu LKS yang berisi tugas, langkah kerja dan penilaian. Untuk mengembangkan keterampilan siswa dapat dilakukan melalui presentasi hasil pekerjaan siswa yang ditulis dalam bentuk laporan.

- 4) Sumber belajar berupa orang yaitu guru dan siswa.

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah guru di SMPN X Lingsar sudah memenuhi standar yang dapat dilihat dari jumlah guru sebanyak 58 orang dan jumlah siswa 995 dengan jumlah siswa per kelas rata-rata 36 orang. Rasio jumlah guru dan siswa SMP Negeri X Lingsar 1: 17. Pada tingkat SMP rasio jumlah guru dan siswa yaitu 1:20. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf D tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan yang menyatakan bahwa rasio jumlah guru dan siswa untuk tingkat SMP yaitu 1:20.

- 5) Teknik/metode yang digunakan guru PPKn.

Penelitian ini menemukan bahwa teknik/ metode yang digunakan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu metode ceramah dan diskusi. Metode yang digunakan oleh guru PPKn yang tercantum dalam RPP maupun pelaksanaan pembelajaran seyogyanya bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti penggunaan metode pembelajaran PBL, PjBL, *Inquiry Learning*, *Discovery Learning* dan yang lebih khusus untuk PPKn yaitu model pembelajaran *Value Clarification Technique* (VCT).

- 6) *Setting* merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling siswa, dapat berupa tempat atau benda yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Terdapat temuan penelitian tentang *setting* di SMPN X Lingsar hanya 6 ruang kelas dari 28 kelas yang memiliki aliran listrik. Oleh karena tidak adanya aliran listrik di setiap kelas menyebabkan guru tidak menggunakan LCD dan tidak mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran.

Seharusnya di setiap kelas memiliki satu stoket listrik yang berfungsi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa pada saat proses pembelajaran seperti guru dapat menggunakan LCD dan dapat menampilkan media pembelajaran yang dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

### **Perangkat pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013**

Perangkat pembelajaran yang lain berupa LKS dan instrumen penilaian PPKn Kurikulum 2013 di SMP Negeri X Lingsar.

#### *LKS*

Temuan penelitian yaitu **Pertama:** LKS yang digunakan oleh guru PPKn kelas VII dan VIII L merupakan LKS yang dibeli di toko buku. **Kedua:** Dalam LKS yang digunakan tidak terdapat indikator untuk semua KD 1, 2, 3, dan 4 serta tidak terdapat penilaian proses dan hasil belajar siswa.

LKS yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 yaitu LKS Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn. LKS yang digunakan merupakan LKS yang dibeli oleh siswa di toko buku. LKS merupakan lembaran yang memuat utuh kompetensi yang akan dicapai. Oleh karena itu guru disarankan mengembangkan LKS secara mandiri sehingga memuat utuh kompetensi yang akan dicapai.

Selanjutnya dalam LKS yang digunakan oleh guru dan siswa SMPN X Lingsar tidak terdapat indikator untuk KD 1, 2, 3, dan 4 serta tidak terdapat penilaian proses dan hasil belajar. Seharusnya guru mengembangkan LKS secara mandiri sehingga setiap komponen dalam LKS yaitu KD, indikator, tugas, langkah-langkah mengerjakan tugas dan penilaian dapat termuat secara utuh.

### *Instrumen Penilaian*

Terdapat beberapa temuan yaitu **Pertama:** Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VII tidak terdapat instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan; **Kedua:** Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VIII tidak terdapat rubrik penskoran; **Ketiga:** saat pelaksanaan pembelajaran guru tidak menggunakan instrumen penilaian dan rubrik penskoran baik instrumen sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

Guru dapat menambah pemahaman dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa dengan menambah pengalaman belajar melalui diskusi dengan sesama guru mata pelajaran dan membaca buku-buku yang relevan dengan bidang ilmunya. Berdasarkan hal tersebut guru dapat memahami cara menyusun instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

Temuan selanjutnya seharusnya guru mengembangkan rubrik penskoran untuk mempermudah guru dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa yaitu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Rubrik penskoran dikembangkan berdasarkan indikator kompetensi yang hendak dicapai.

Saat pelaksanaan pembelajaran guru tidak menggunakan instrumen penilaian dan rubrik penskoran baik instrumen sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Guru seharusnya berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui diskusi dengan sesama guru atau melalui MGMP untuk dapat menyusun instrumen penilaian berdasarkan Kurikulum 2013.

### **Pelaksanaan Pembelajaran PPKn**

Terdapat beberapa temuan penelitian di kelas VII SMPN X Lingsar yaitu: **Pertama:** Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa hanya pada jam pertama yaitu pukul 07.30, **Kedua:** Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, **Ketiga:** Guru dan siswa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pembelajaran di kelas dan tidak mengakhiri pembelajaran dengan berdoa.

Seyogyanya guru sebelum melakukan pembelajaran di setiap kali pertemuan mengawali pembelajaran dengan berdo'a, tidak hanya pada jam pelajaran yang pertama tetapi juga pada jam kedua, ketiga dan seterusnya agar pengembangan sikap religius siswa melalui berdoa sebelum melakukan pembelajaran dapat dikembangkan di semua kelas, bukan hanya kelas yang mendapat jadwal pelajaran PPKn pada jam pertama saja.

Selanjutnya seorang guru seyogyanya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat, sehingga ada konsistensi antara pelaksanaan pembelajaran dengan rancangan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sesuai dengan RPP yang telah disusun.

Temuan selanjutnya guru seharusnya melaksanakan seluruh bagian dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam ketiga tahapan tersebut terdapat beberapa bagian kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sikap religius siswa, antara lain mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pembelajaran di kelas dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa.

Selain temuan tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas VII, peneliti juga membahas tentang temuan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII. Temuan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas VIII yaitu: **Pertama:** Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, **Kedua:** Guru dan siswa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran proses pembelajaran di kelas, **Ketiga:** Guru tidak melakukan pengembangan sikap religius dan sikap sosial siswa dari hasil analisis KD 3 dan KD 4.

Berdasarkan temuan penelitian di kelas VII dan kelas VIII terdapat persamaan yaitu guru Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru tidak mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan syukur.

Temuan selanjutnya yaitu dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn, guru tidak melakukan pengembangan sikap religius dan sikap sosial siswa dari hasil analisis KD 3 dan KD 4. Berdasarkan hasil analisis

terhadap KD 3 dan KD 4 tersebut sikap religius yang dapat dikembangkan antara lain adil, menegakkan kebenaran, dan jujur. Sedangkan sikap sosial yang dapat dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti untuk sikap sosial yaitu peduli, tanggung jawab, dan percaya diri.

## **Penilaian Proses dan Hasil Belajar Berdasarkan Kurikulum 2013**

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu **Pertama:** Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VII tidak terdapat Penilaian proses dan hasil belajar siswa, **Kedua:** RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VIII tidak terdapat rubrik penskoran untuk KD 1, 2, 3, dan 4, **Ketiga:** Dalam pelaksanaan pembelajaran guru melakukan penilaian sikap religius yaitu berupa ucapan salam dan berdoa dan sikap sosial siswa yaitu sikap kerja sama saat diskusi kelompok, **Keempat:** Dalam pelaksanaan pembelajaran guru hanya menggunakan teknik observasi untuk menilai sikap religius dan sosial. Guru tidak menggunakan teknik penilaian diri dan penilaian antarteman. **Kelima:** Dalam menilai pengetahuan siswa guru menggunakan tes tulis dan penugasan dan tidak menggunakan tes lisan. **Keenam:** penilaian keterampilan siswa, guru hanya menggunakan unjuk kerja saja dan guru tidak menggunakan penilaian proyek, produk, dan portofolio.

Untuk temuan pertama dan kedua pembahasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan tentang instrumen penilaian.

Temuan ketiga seorang guru seyogyanya melaksanakan penilaian penilaian sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan hasil analisis dari KD 3 dan KD 4 serta metode yang digunakan oleh guru. Siswa tidak mampu mencapai kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial apabila KI, KD 1, dan KI, KD 2 tidak dianalisis dan tidak dilaksanakan sesuai dengan RPP.

Temuan keempat seyogyanya guru menerapkan standar penilaian yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu penilaian sikap religius dan sikap sosial tidak hanya melalui observasi namun juga dilakukan melalui penilaian diri dan antarteman. Guru dapat melakukan penilaian sikap melalui berbagai teknik sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan dalam Permendikbud No 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.

Temuan kelima guru seyogyanya melakukan penilaian pengetahuan melalui berbagai teknik sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai teknik dan instrumen penilaian, tidak hanya melalui teknik penilaian tes tulis dan penugasan. Ada teknik penilaian lain yang dapat digunakan yaitu penilaian melalui tes lisan.

Selanjutnya guru seyogyanya melaksanakan penilaian keterampilan sesuai dengan standar penilaian yang sudah ditentukan dalam Kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian autentik. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan melalui berbagai teknik dan instrumen penilaian, tidak hanya melalui teknik penilaian unjuk kerja. Masih ada teknik penilaian lain yang dapat digunakan yaitu penilaian proyek, produk, dan portofolio.

### **Kendala dihadapi oleh guru dalam pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013.**

Terdapat beberapa temuan penelitian yaitu **1)** Kompetensi guru PPKn belum cukup memadai dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, media pembelajaran, LKS dan instrumen penilaian, **2)** Kompetensi guru belum cukup memadai dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik, **3)** Kompetensi guru belum cukup memadai dalam mengembangkan instrumen penilaian dan melaksanakan penilaian autentik.

Seorang guru dituntut harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun perangkat pembelajaran yang baik sehingga perangkat pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan Kurikulum 2013. Kompetensi pedagogik guru diperlukan dalam menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, media pembelajaran, bahan pembelajaran, LKS dan instrument.

Temuan selanjutnya guru diharapkan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan atau musyawarah guru mata pelajaran. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen Pasal 12 Ayat 4 yang menyatakan pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan

pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai guru.

Kompetensi guru PPKn belum cukup memadai dalam mengembangkan instrumen penilaian dan melaksanakan penilaian autentik. Untuk meningkatkan kompetensi guru, maka sekolah perlu mengadakan pelatihan untuk guru dan melakukan musyawarah guru mata pelajaran agar dapat melaksanakan penilaian autentik berdasarkan Kurikulum 2013.

### **Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013.**

Karena adanya beberapa kendala dalam penerapan Kurikulum 2013 yang dirasakan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar, maka telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu **a)** guru melakukan diskusi antar guru melalui forum MGMP sehingga dapat menambah pemahaman tentang penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan menilai proses dan hasil belajar sesuai dengan Kurikulum 2013, **b)** Guru mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Dikpora Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

Guru dapat menambah pengalaman belajar lainnya melalui kegiatan akademik yang dilakukan guru melalui kegiatan-kegiatan yang relevan dengan bidang keilmuannya meliputi kegiatan pelatihan, seminar, diskusi, *workshop*, loka karya, penelitian dan membaca bahan pembelajaran yang relevan dengan bidang ilmunya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Namun kegiatan sosialisasi yang telah diikuti oleh guru PPKn SMPN X Lingsar belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013. Maka upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan adalah meningkatkan intensitas dan frekuensi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum 2013 dalam bentuk *workshop*, DIKLAT ataupun kegiatan bimbingan teknis yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai proses dan hasil belajar siswa sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.

## SIMPULAN

Persiapan yang dilakukan oleh SMPN X Lingsar dan guru PPKn untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

### a. Sosialisasi dan Pelatihan

Guru PPKn SMPN 2 Lingsar pernah mengikuti kegiatan sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Dikpora Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk seminar dan *workshop*. Sosialisasi yang telah diikuti oleh guru PPKn SMPN X Lingsar belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 karena guru PPKn SMPN X Lingsar kurang memahami secara komprehensif dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.

### b. Penyiapan sumber belajar di SMPN X Lingsar

#### 1) Sumber belajar yang pertama yaitu pesan yang berupa silabus dan RPP

Guru PPKn tidak melakukan *rekonstruksi* terhadap silabus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga terdapat beberapa komponen dalam silabus yang belum termuat. Guru PPKn dalam menyusun RPP tidak menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Sehingga RPP yang disusun belum sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.

#### 2) Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah buku guru dan buku siswa yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam buku siswa yang digunakan ada beberapa komponen yang belum termuat karena guru PPKn tidak membuat bahan pembelajaran secara mandiri.

#### 3) Alat dan media pembelajaran. Jumlah alat pembelajaran yang tersedia di SMPN X Lingsar berupa LCD hanya terdapat 2 buah LCD di sekolah. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 28 sehingga jumlah LCD yang tersedia tidak memenuhi standar karena tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada.

#### 4) Sumber belajar berupa orang yaitu guru dan siswa. Jumlah guru di SMPN X Lingsar sudah memenuhi standar. Hal ini dapat

dilihat dari jumlah guru sebanyak 58 orang dan jumlah siswa 995 dengan jumlah siswa per kelas rata-rata 36 orang. Rasio guru dan siswa SMP Negeri X Lingsar 1: 17. Pada tingkat SMP rasio guru dan siswa yaitu 1:20.

- 5) Teknik/metode yang digunakan oleh guru PPKn berupa ceramah dan diskusi. Guru tidak menggunakan metode pembelajaran PBL, PjBL, *Inquiry Learning*, *Discovery Learning* atau *Value Clarification Technique (VCT)*.
- 6) *Setting* SMPN X Lingsar. Dari 28 ruangan kelas hanya 6 ruangan kelas yang memiliki aliran listrik. Karena tidak ada aliran listrik di setiap kelas menyebabkan guru tidak menggunakan LCD dan tidak menggunakan media pembelajaran

Berikut kesimpulan penelitian tentang perangkat pembelajaran berupa LKS dan instrumen penilaian PPKn Kurikulum 2013 di SMP Negeri X Lingsar.

a. Lembar Kerja Siswa

LKS yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 yaitu LKS Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn. Dalam LKS yang digunakan tidak terdapat indikator untuk semua KD 1, 2, 3, dan 4 serta tidak terdapat penilaian proses dan hasil belajar siswa. Hal tersebut terjadi karena LKS yang digunakan merupakan LKS yang dibeli oleh siswa di toko buku dan guru PPKn SMPN X Lingsar tidak membuat LKS sendiri.

b. Instrumen Penilaian

Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn SMPN X Lingsar kelas VII tidak terdapat instrumen penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan karena guru kurang memahami dalam mengembangkan indikator penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam RPP yang digunakan oleh guru PPKn kelas VIII tidak terdapat rubrik penskoran karena menurut guru sulit dikembangkan dan sangat rumit dilaksanakan melihat banyaknya jumlah siswa.

Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 di SMPN X Lingsar belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rancangan yang telah disusun.

Penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh guru PPKn belum dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 karena guru belum melakukan penilaian autentik.

Kendala yang dihadapi oleh guru PPKn dalam melaksanakan Kurikulum 2013 yaitu **a)** kompetensi guru belum cukup memadai dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, materi pembelajaran, LKS, media pembelajaran dan instrumen penilaian, **b)** kompetensi guru belum cukup memadai dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik, **c)** kompetensi guru belum cukup dalam mengembangkan instrumen penilaian autentik yang dapat mengukur kompetensi yang hendak dicapai.

Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa yaitu **a)** Guru mengikuti sosialisasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Dikpora Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, **b)** guru melakukan diskusi antar guru melalui forum MGMP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah.M. (2014).*Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Kemendikbud. 2016.*Buku Guru PPKn*. Kemendikbud: Jakarta.
- Kunandar. 2013. *Penilaian Autentik*.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moleong, L.J. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen



## **Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013**

**Miftahul Khair<sup>1</sup>, Suud<sup>1</sup>, Rispawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Pendidikan IPS FKIP Mataram

Email: [miftahulkhair724@gmail.com](mailto:miftahulkhair724@gmail.com), [rispa64@gmail.com](mailto:rispa64@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dan subyek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif melalui langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Suryawangi memiliki partisipasi aktif dengan orientasi politik lebih bersifat Kognitif dari pada afektif. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada secara langsung di Kabupaten Lombok Timur yang sudah terbilang cukup tinggi yang dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk ikut serta melakukan pencoblosan tanpa paksaan dari orang lain untuk menggunakan dalam hak pilihnya. Masyarakat Kelurahan Suryawangi tergolong partisipan aktif dan pasif, masyarakat ikut melakukan pencoblosan dikarenakan ingin memilih salah satu pasangan yang mereka anggap sebagai yang terbaik dan ada yang memilih berdasarkan fanatisme organisasi keagamaan yakni NW.

**Kata Kunci:** Partisipasi politik, Pemilukada

### **Abstract**

The objective of the study was to describe the Political Participation of Society in the General Election of Regional Head in 2013 in East Lombok Regency (Study on Suryawangi Urban Village, Labuhan Haji Subdistrict). This research uses qualitative approach with descriptive method. Informants and subjects in this study were determined using Purposive Sampling technique. Date that has been collected in the analysis descriptively through data reduction steps, data presentation, and conclusions. The results of the research show that the Suryawangi urban community has active participation with more cognitive

political orientation than affective. The level of community participation in the direct election in East Lombok regency which is already quite high where the community already has the awareness to participate in voting without the coercion of others to use in the right to vote. Suryawangi's people urban village Classified as active and passive participant, people participate in voting because they want to choose one of the couple that they regard as best and some choose based on religious organization fanaticism that is NW.

**Keywords:** Political participation, election of regional head.

## PENDAHULUAN

Negara demokrasi memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan semua mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai pemeran utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan orang yang akan menjadi pemimpin lima tahun kedepan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang akan memimpin lima tahun kedepan.

Jika bicara kekuasaan selalu identik dengan politik yang dimana dapat kita lihat politik tanpa kekuasaan itu seperti agama tanpa moral, namun satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik, kekuasaan merupakan suatu hal yang selalu berhubungan antara manusia dan pemegang kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan, pemilihan kepala daerah dan partisipasi politik masyarakat sangat berkaitan karna rakyat atau masyarakat sendirilah yang mempunyai kuasa untuk memilih sendiri siapa yang paling dianggap baik menurut mereka. Oleh sebab partisipasi politik masyarakat sangat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan. Untuk meningkatkan semua itu, maka masyarakat diminta untuk memilih calon-calon yang tepat dan merujuk pada program kerja yang Pro-rakyat yang mereka sampaikan pada saat berkampanye. (Miriam Budiardjo, 2008:367)

Konsep kesejahteraan dalam pemilihan kepala daerah adalah bahawa masyarakat sendirilah yang menentukan nasibnya sendiri untuk memilih

pemimpin yang akan membawanya kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Asumsi yang mendasari demokrasi (Partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara itu meliputi mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik (Pilkada). (Rahman, 2007: hal 285)

Dalam konteks politik, dinamika dalam pemilihan kepala daerah sangat beragam jenisnya, karna dalam menentukan siapa yang akan berkuasa msasyarakat sebagai pembuat dan pelaksana keputusan politik sering dibuat pusing dengan pencitraan-pencitraan media masa yang kian membutuhkan hati nurani msasyarakat hingga politik hitam seperti Money Politic (politik uang) yang digunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui pilihan masyarakat sehingga memilih calon tertentu, terus saja semakin merajalela dari masa ke masa.

Dalam proses pemilihan dan penentuan pilihan, strata pendidikan juga sangat menentukan kemana arah pilihan seseorang akan berlabuh. Orang yang pendidikannya tinggi sudah pasti akan berfikir dan menganalisis terlebih dahulu visi-misi dan track record calon yang dipilihnya, jika visi-misi dan track record salah satu pasangan calon menurutnya relatif sama dengan keinginan orang tersebut, maka orang tersebut sudah pasti akan memilihnya. Lain halnya dengan pemilih yang berpendidikan rendah, orang yang berpendidikan rendah justru akan mudah terpengaruh dan terpedaya oleh pihak-pihak yang menggunakan segala cara untuk medapatkan kursi di pemerintahan. (Miriam Budiardjo, 2008:367)

Hal ini senada dengan masyakat pemilih di Kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji yang dimana masyarakatnya lebih memilih pasangan calon berdasarkan apa yang mereka ketahui dan berdasarkan track record sehingga dapat menimbang dan memilah mana yang harus mereka pilih. Pemilih jenis ini bisa dikatagorikan kedalam pemilih rasional yang memiliki ranah berfikir kognitif dalam menentukan apa yang mereka pilih. Pemilih rasional memusatkan pada aktor politik. Menurut George Ritzer (2007:394) aktor dipandang sebagai manusia

yang memiliki tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan. Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang sesuai tujuan dan harapan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada dari sebagian besar masyarakat yang lebih memilih berdasarkan fanatisme organisasi. Kondisi ini terjadi dikarenakan paham Organisasi keagamaan sangat kental dikalangan masyarakat Lombok Timur khususnya di kelurahan Suryawangi, yang dapat merubah serta membelokkan arah politik masyarakat. Tidak terkecuali seperti organisasi Keamanan terbesar di lombok yaitu Nahdatul Wathan (NW) yang secara terang-terangan menyebarkan ajakan dan meminta dukungan penuh dari para pendukung dan simpatisannya untuk memilih pasangan calon yang mereka usung.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) kabupaten Lombok Timur periode 2013-2018 berhasil dimenangkan pasangan H.M. Ali bin Dahlan dan H. Khaerul Warisin (Alkhaer). Kemenangan tersebut ditetapkan setelah dilakukan rekapitulasi dan rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten lombok timur pada hari senin 20 mei 2013. Pasangan jalur independen, H.M. Ali bin dahlan dan H. Khaerul warisin berhasil mendapatkan suara sebanyak 272.276 suara, sementara pasangan nomer urut 2, H.Wahab dan Lale yakutunnafis (wali) mendapatkan 61.276 suara, pasangan nomer urut 3, H.M Sukiman azmi dan H.M Syamsul luthfi (sufi) berhasil mengumpulkan sebanyak 255.387 suara, dan pasangan calon nomer urut 4, H. Usman fauzi dan M. ikhwan sutrisno (mapan) berhasil meraih 26.510 suara. Dalam pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada) kabupaten lombok timur tercatat jumlah suara yang sah sebanyak 615.899 suara, sedangkan yang suara yang tidak sah sebanyak dan golput 36.790 suara sehingga total sebanyak 662.689 suara. (<http://www.suarantb.com/pilkadalotim>).

Pendidikan, rata-rata masyarakat Kelurahan Suryawangi telah menempuh jenjang pendidikan 12 tahun seperti SMP/MTs sampai tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat dan ada menempuh pendidikan di sekolah tinggi (S1, S2 dan S3). Oleh sebab itu sangat memungkinkan para pemilih di kelurahan ini menjadi pemilih cerdas atau rational voter dimana pemilih jenis ini tidak terpengaruh oleh hal-hal yang berbau

politik yang tidak sehat seperti politik organisasi, politik uang (Money Politic) dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pilihan masyarakat berlabuh pada pasangan calon dari jalur independen yang sudah terbukti di kepemimpinan sebelumnya telah membawa banyak perubahan yang dibandingkan dengan bupati setelahnya maka pada pilkada tahun 2013 dimenangkan telak oleh pasangan nomer urut satu yaitu M. Ali bin Dahlan dan H. Khaerul Warisin (Alkhaer). (Data dan Profil Kelurahan Suryawangi tahun 2017)

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Moleong (2010:4) yang mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lebih lanjut, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2012:14).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono. 2012: 62). Teknik pengumpulan data itu sendiri merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Maksud diadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 2010: 186) antara lain: mengkontruksi perihal orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagaimana yang diharapkan pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang

diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Semi Structured Interview yang dilaksanakan menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman wawancara) yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, maka mula-mula pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada responden, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut (Arikunto, 2010: 270). Dalam hal ini respondennya adalah yang sudah terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas, biasanya mereka memiliki pengetahuan serta mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Tujuan dilaksanakan wawancara adalah untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Suryawangi pada Pilkada di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono. 2012:329). Lebih lanjut dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Satory. 2014:149). Teknik dokumentasi digunakan untuk dapat melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen berisi informasi tentang hasil penelitian asli atau langsung dari sumbernya. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berupa geografi lokasi penelitian, demografi lokasi penelitian, jumlah penduduk, sarana dan prasana yang terdapat di lokasi penelitian, serta kondisi sosial budaya yang ada di lokasi penelitian. Data dokumentasi tentang gambaran umum kelurahan suryawangi sudah tersedia dan diperoleh di kantor kelurahan.. Dokumen yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang partisipasi politik yang dikutip dari berbagai sumber baik dari buku maupun internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Deskripsi hasil ini mencakup hasil wawancara dan hasil analisis. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya, yakni Beberapa masyarakat kelurahan Suryawangi yang berpendidikan lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas dan lulusan perguruan tinggi. Mereka merupakan masyarakat Kelurahan Suryawangi yang bermata pencaharian sebagai petani, tukang, buruh tani, peternak, PNS dan lain-lain. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan yang berkaitan dengan Partisipasi politik masyarakat di kelurahan Suryawangi serta memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai data-data dan dokumen. kriteria yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun subjek informan dalam penelitian ini yakni:

**Tabel 10. Identitas Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Majedi, S.Sos.	57	S1	Lurah Suryawangi
2	M. Gaswaini, S.Pd.	42	S1	Guru
3	Sulhanuddin S.Pd	52	S1	Kadus
4	Husnul Hadi S.Hi.	38	S1	Ketua PPS 2013

Sumber: Data Primer, 2017

**Tabel 11. Identitas subyek Penelitian**

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Masdariah S.Pd	29	S1	Pedagog
2	M.Sopiandi	24	SMK	Montir
3	Bungaidi	43	SMA	Wiraswasta
4	H.Solihun jalil	45	SMA	Petani
5	Inaq.Kartini	35	SMP	Pedagog
6	Munirep	50	SMP	Buruh Tani

Sumber: Data Primer, 2017

## PEMBAHASAN

### Tingkat Partisipasi politik masyarakat

Menurut Miriam Budiarmo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan subyek penelitian pada masyarakat Kelurahan Suryawangi dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2013 kemarin cukup tinggi dan beragam terutama dalam hal pemberian suara dan dukungan, masyarakat sangat antusias sekali dengan pemilihan kepala daerah tahun 2013 kemarin. Terbukti dengan wawancara yang dilakukan dengan informan dan subyek penelitian maka dapat dikatakan masyarakat di kelurahan Suryawangi sebagai partisipan aktif.

Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Suryawangi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2013 sudah sangat aktif dalam partisipasi politik. Pemahaman arti demokrasi yang makin luas dikalangan masyarakat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika politik bangsa, terutama di kelurahan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji. Salah satu indikator berjalannya politik secara demokratis. Hal ini ditunjang dengan tingkat pendidikan masyarakat kelurahan suryawangi yang rata-rata jenjang pendidikan yang di tempuhnya sudah mencapai jenjang pendidikan 12 tahun.

Dari pernyataan yang di nyatakan oleh informan maupun subyek diatas bahwa masyarakat sudah memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran akan hak politik mereka untuk turut ikut serta berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah (bupati/wakil bupati) pada tahun 2013 secara langsung tanpa paksaan orang lain. Masyarakat kelurahan Suryawangi merupakan masyarakat yang memiliki partisipasi yang aktif. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kelurahan Suryawangi memiliki kepedulian terhadap daerahnya karna pemerintahan daerahlah yang memegang peranan penting dalam memajukan daerah tersebut dan masyarakat ikut serta mengubah daerahnya menjadi lebih baik lagi melalui Pilkada.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.**

Pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2013 kemarin, terdapat faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya faktor perasaan (afektif) dan pengetahuan (kognitif). Seseorang yang menentukan pilihan berdasarkan perasaan (afektif) maka akan membentuk partisipasi politik subjek/kaula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Almond dan Verba (1987:18) mengungkapkan Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai kecendrungan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik yang bersifat afektif, maka akan membentuk budaya politik yang bersifat kaula atau subjektif.

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lainnya. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan subyek penelitian pada masyarakat Kelurahan Suryawangi diatas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu:

### *Pengaruh organisasi religious dalam masyarakat (bersifat Afektif)*

Pengaruh organisasi keagamaan dalam hal ini NW (nahdatul wathan) sangatlah besar perannya untuk mempengaruhi arah politik masyarakat di kelurahan Suryawangi dikarenakan ada pasangan calon yang bersal dari

organisasi tersebut yang didukung penuh. Oleh karenanya para simpatisan dari organisasi tersebut sangat dianjurkan memilih pasangan calon yang berasal dari internal organisasi dengan berbagai pendekatan, misalnya melalui ceramah atau pengajian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat yang panatisme organisasinya sangat kuat padahal masyarakat atau individu tersebut telah menempuh jenjang pendidikan tinggi akan tetapi sangat bisa terpengaruh dikarenakan rasa cinta dan fanatisme yang begitu mendalam terhadap organisasi tersebut sehingga arah pilihan politiknya juga akan berubah. Pengaruh semacam ini bisa berdampak positif dan negatif. Bisa menjadi positif apabila pasangan calon yang mereka usung membawa keuntungan dan penghidupan yang lebih baik di masyarakat. Menjadi negatif apabila pasangan calon yang mereka usung tidak membuat suatu perubahan yang berarti di masa kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kecenderungan sikap dan orientasi politik masyarakat ini bersifat afektif yang hal tersebut juga mempengaruhi kepartisipasian politik masyarakat di Kelurahan Suryawang sebagaimana di jelaskan bahwa tipe partisipasi politik subjek ini berorientasi kepada budaya politik *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial, politik dan religious , apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. dengan kecenderungan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik bersifat afektif dan memiliki ikatan batin sebagai simpatisan dan pendukung. (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat juga memilih berdasarkan kedekatan dengan salah satu pasangan contohnya masyarakat banyak yang memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni SUFI yang didukung oleh NW (Nahdatul Wathan). Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat Kelurahan Suryawangi juga masih menjadi basis NW karena di Kelurahan Suryawangi organisasi NW masih sangat berpengaruh terutama di bidang kerohanian dan merambah ke politik,

Pernyataan- pernyataan dari Subyek penelitian, dapat diketahui bahwa jika melihat kecenderungan sikap dan orientasi politik masyarakat memiliki orientasi afektif. Kecenderungan Sikap dan orientasi dengan karakteristik bersifat afektif ini bahwa dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilukada secara langsung tahun 2013 kemarin,

masyarakat memilih berdasarkan bagaimana penampilan aktor politik itu, bagaimana kedekatan aktor politik dengan pemilih yang dipasilitasi oleh organisasi politik tempat dia bernaung. Dalam (Almond dan Verba (1984:16).

*Tingkat pendidikan dan ekonomi yang berorientasi kognitif.*

Dikemukakan oleh James S. Coleman (dalam George Ritzer, 2007:394) teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumberdaya. Disini pemilih sudah pintar memilih dan memilah siapa yang pantas dipih dan tidak.

Tingkat pendidikan dan ekonomi disini juga mempengaruhi pilihan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat ekonomi dan pendidikan Kelurahan Suryawangi sudah relatif maju dan rata-rata masyarakatnya telah menamatkan jenjang pendidikan 12 tahun.

Partisipasi politik partisipan dicirikan dengan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik bersifat kognitif yaitu Electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya (Mas'ood dan MacAndrews, 2000:225).

Kecendrungan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik bersifat kognitif ini dicirikan dengan masyarakat memilih berdasarkan pengamatan dan analisis, yang dimaksud disini adalah bagaimana visi dan misi yang di programkan oleh masing-masing calon dan yang paling terpenting adalah bagaimana track record atau riwayat hidup dan latar belakang dari masing-masing calon tersebut sehingga dapat menentukan pilihan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat di kelurahan suryawangi kebanyakan lebih memilih pasangan ALKHAER dibandingkan pesaingnya SUFI yang secara Track Record diperintahkan sebelumnya dirasa kurang mampu mensejahterakan.

Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan dan orientasi kognitif dari masyarakat atau pemilih. Adapun hal yang membuat kemenangan dari pasangan ALKHAER adalah masyarakat sudah merasa puas dengan hasil pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Ali BD pada periode sebelumnya ada juga yang merasa sedikit dikecewakan pasangan bupati setelahnya yaitu SUFI yang ingin mencalonkan dirinya lagi pada pemilukada tahun 2013. Karna selama menjabar masyarakat merasa kurang diperhatikan, sehingga mereka memilih pasangan calon ALKHAER.

Menurut Almond dan Verba (1984:16) “Orientasi kognitif adalah pengetahuan, yaitu misalnya bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara didalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktifitas partai politik tersebut bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan media massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif. Pengetahuan seseorang bisa bertambah atau kurang tergantung kepada pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling”.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa partisipasi Politik masyarakat Kelurahan Suryawangi pada pemilihan umum kepala daerah secara di kabupaten Lombok Timur tahun 2013. Partisipasi politik adalah hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan, dengan berpartisipasi dalam politik kita bisa mengubah dan mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah, selain itu dengan berpartisipasi dalam politik kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tanpa adanya partisipasi politik maka negara akan menjadi suatu negara yang otoriter dimana penguasalah yang akan menentukan segala sesuatunya tanpa boleh satu orangpun untuk mengubah ataupun menentang keputusan penguasa.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Suryawangi mempunyai ciri masyarakat partisipasi aktif dengan kecendrungan sikap dan orientasi politik yang bersifat Kognitif dan afektif dalam menentukan pilihannya pada Pilkada tahun 2013 kemarin. Masyarakat rata-rata memilih berdasarkan

pengetahuannya tentang salah satu calon yang secara track record telah berhasil memikat hati masyarakat dan yang masih memakai pengaruh fanatisme organisasi. Tingkat pendidikan ekonomi masyarakat Kelurahan Suryawangi sudah relatif maju. Masyarakat sudah memiliki minat, kesadaran dan perhatian terhadap sistem politik dan termasuk masyarakat partisipasi aktif. Masyarakat masih pasif dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dalam hal menolak maupun menerima sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur masih belum terlalu aktif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jurusan IPS FKIP Universitas Mataram dan Dewan Redaksi Jurdiksiam yang memfasilitasi dalam penelitian dan publikasi hasil kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Khorul M, & Vina salviana. 2006. *Perilaku Partai Politik*. Malang: UMM Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Konteks barteologi Indonesia; pengalaman islam*. Jakarta: Paramadina.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Budiwati, Erni. 2005. *Islam Sasak; Waktu Telu Versus Waktu Lima*. rni. 2005. *Islam Sasak; Waktu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jackson, Karl D. 1978. *Bureaucratic: A Theoretical Framework for Anlalysis of Power And Communication in Indonesia*. Berkley: Universty of California Press.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> diakses pada tanggal 30 januari 2016 jam 12.30 wita.

<http://kekayaanindonesiakublogspot.com> diakses pada tanggal 25 januari 2016 jam 18.20 wita.

<http://KPUlotim.go.id> diakses pada 20 september 2016 pukul 21.40 wita.

<http://www.ntbprov.go.id> diakses pada tanggal 30 januari 2016 jam 13.00 wita.

Kantaprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.

Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Maksudi, Beddy Irawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia pemahaman secara teoritik dan Empirik*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Sari, Eko Puspita. 2011. Pengaruh Pelembagaan Partai Golkar Yogyakarta Terhadap Pola Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009. Skripsi. UNY.

Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta.

Septianigrum, Galuh. 2014. Budaya Politik dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Suwatu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Pati Pada Tahun 2012. Skripsi. UNY

Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Syakur, Ahmad Abd. 2006. *Islam Dan Kebudayaan, Artikulasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Zuhdi, Muhammad Arifin.2009. *Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagaman Komunitas Islam Wetu Telu di Bayan Lombok*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.